

**KEBIJAKAN PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG LARANGAN MANTAN KORUPTOR
SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM PEMILU
SERENTAK 2019**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:
BAHRUDIN
2018-02-007**

**kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020**

TESIS
“KEBIJAKAN PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN
MANTAN KORUPTOR SEBAGAI CALON LEGISLATIF DALAM
PEMILU SERENTAK 2019”

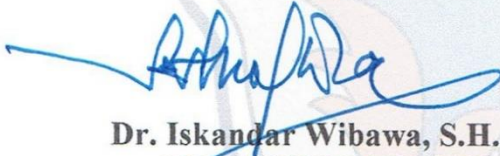
Disusun oleh:

Bahrudin
2018-02-007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Februari 2020

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H
NIDN. 0610701000001013

Anggota Dewan Penguji I



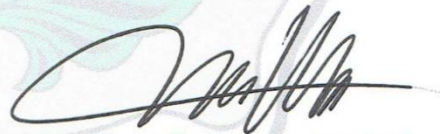
Dr. Suparno, S.H., M.S
NIDN. 0610701000001014

Pembimbing Pendamping



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN. 0610701000001007

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N
NIDN. 0610701000001268

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 29 Februari 2020



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Al-Insyirah:6)”**

**“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat
bagi orang lain”**

Persembahan:

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta
2. Istriku tercinta, kedua anakku Muhammad Ahza AlAzam dan Fatih Alfa Rizqi
3. Keluarga Bawaslu Kabupaten Kudus

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrudin

NIM : 2018-02-007

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 3 Maret 2020

Yang memuat pernyataan



Bahrudin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kebijakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Koruptor Sebagai Calon Legislatif Dalam Pemilu Serentak 2019”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan, kepada:

1. Dr. Suparno, S.H., M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat.
4. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat.
5. Kedua orang tua, ibu mertua dan istriku tercinta yang telah memberikan motivasi dan doa, sehingga penulis menjadi semangat dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 29 Februari 2020
Penulis

Bahrudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Yuridis Pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018	29
1. Kewenangan KPU dalam menyusun PKPU Nomor 20 Tahun 2018.....	29
2. Mekanisme penyusunan PKPU Nomor 20 Tahun 2018	31
B. Pengaturan Tentang Hak Politik Warga Negara.....	34
C. Sinkronisasi Hukum Pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018	37

D. Etika Politik	41
E. Pemilu Pilar Demokratis.....	46
F. Teori Bekerjanya Hukum	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Kedudukan Pengaturan Larangan Mantan Koruptor Untuk Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Ditinjau dari Sinkronisasi Hukum dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Tinggi	57
1. Tinjauan yuridis PKPU Nomor 20 Tahun 2018	58
2. Sinkronisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	72
B. Kajian dari Perspektif Etika Politik dan Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Mantan Koruptor yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota legislatif.....	97
1. Tinjauan dari perspektif etika politik	97
2. Tinjauan dari politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia	102
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Simpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian penelitian.....	19
Tabel 2. Sinkronisasi hukum pengaturan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.....	80



DAFTAR GAMBAR

Skema 1. Kerangka pemikiran	55
Skema 2. Kerangka hasil penelitian.....	57

